



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Pansus Sumber Waras Kena ‘Angin Duduk’

Awalnya Galak, Sekarang Melempem

SEJUMLAH pihak menduga Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK atas APBD 2014 yang menyoroti soal indikasi korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), mulai masuk angin, pasca bertemu Direktur RSSW.

Hal itu ditandai sejumlah bukti. Salah satunya, batalnya pansus melaporkan hasil temuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bungkamnya Ketua Pansus Triwisaksana dalam menjawab pertanyaan media mengenai kelanjutan pansus.

“Usai bertemu Dirut Sumber Waras saat melakukan kunjungan beberapa waktu lalu, Pansus DPRD terkait Sumber Waras nampaknya sudah kena angin duduk. Mereka mulai bungkam, padahal sebelumnya mereka sangat galak dan kritis,” ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky

Khadafi kepada INDOPOS, kemarin.

Dia menjelaskan, pansus harus menjelaskan ke publik hasil kunjungan ketemu dengan pihak Sumber Waras. “Setelah ketemu dengan dirut Sumber Waras, anggota pansus jadi jinak, dan galak kok hilang iya. Hal ini mengindikasikan dugaan pansus sudah kena angin duduk alias menuju jalan akan damai damai saja,” sindir Uchok.

Kedua, sambung Uchok, kasus sumber waras ini seperti akan ditinggali atau diabaikan saja karena keinginan DPRD sudah tercapai.

Di sisi lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengaku tak kaget dengan sikap para anggota dewan. Diapun enggan mengomentari hal tersebut terlalu banyak. “Terserah anggota DPRD mau apa,” tandas dia.

Namun yang jelas, kata Prijanto, penyelidikan BPK mengenai tanah RS Sumber Waras, tidak efektif dan pemborosan. “Mengapa mesti menghamburkan uang rakyat membeli 36.410 meter persegi, padahal kebutuhan minimal 2.500 meter persegi,” ungkap dia.

Sebelumnya BPK telah menunjuk sejumlah tanah yang dimiliki pemprov DKI yang pantas dibangun rumah sakit, antara lain di Jl. MT Haryono Kav 35, 36, 37, seluas

12.000 meter persegi. Berdasar kajian teknis yang ditandatangani Kadiskes DKI tanah milik RS sumber Waras tidak siap bangun.

Prijanto juga menilai pembelian lahan dipaksakan sementara tanah tersebut masih menunggak pajak PBB sebesar Rp 6 miliar. Berdasar kajian LHP BPK, beberapa indikasi korupsi yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Yakni tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Premendag Nomor 13/2006. Bahkan merugikan negara sebesar Rp 191 miliar atau Rp 484 miliar (dari perspektif selisih harga aset). **(wok)**

PANDANGAN MANTAN WAGUB PRIJANTO

- ✓ Lahan yang dibeli tak siap bangun
- ✓ Masih ada 15 bangunan yang digunakan oleh rumah sakit
- ✓ Areal RS Sumber Waras rawan banjir
- ✓ Lokasi tak strategis dan rawan macet
- ✓ Lokasi tidak bukan di Jalan Besar Kyai Tapa, melainkan di Jalan Arteri Tomang Utara